

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara memiliki pengaruh besar di berbagai daerah dengan tujuan utama yaitu melakukan perdagangan. Terjalin hubungan setara antara penjual dan pembeli, namun lambat laun menjadi berubah (Daliman, 2012, hlm 36). Ditandai dengan munculnya praktik perbudakan akibat dari kolonialisme Belanda yang telah hadir sejak abad ke-17. Bangsa Belanda memanfaatkan sistem perbudakan untuk keuntungan ekonomi mereka. (Reid, 2011). Belanda mendirikan perusahaan dagang VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan tujuan memperkaya negaranya melalui monopoli perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam serta eksploitasi tenaga kerja budak (Yasa, 2013, hlm. 251). Salah satu praktik perbudakan terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Para budak tersebut dikenal dengan julukan “Belanda Depok”.

Dengan ambisi mencapai tujuannya, Belanda mendirikan kota-kota untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik di wilayah jajahan. Kota kolonial pertama adalah *Oud Batavia* (Batavia Lama) yang dibangun oleh VOC pada tahun 1619 dan berkembang pesat hingga luas wilayahnya bertambah tiga kali lipat (Nas, 2007, hlm 304). Perkembangan masyarakat kolonial pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Camphuijs (1634-1695) ditandai munculnya keinginan dari kelompok elit yang memilih untuk menetap di Jawa dibandingkan di negeri asalnya. Kelompok elit ini berbondong-bondong membangun tempat tinggal di sekitar kawasan Batavia. Berpindahnya kelompok elit ini menyebabkan bertambah luasnya kekuasaan Batavia hingga ke wilayah selatan kota (Taylor, 2009, hlm. 86).

Depok yang letaknya di selatan Batavia, terkena dampak dari perpindahan kelompok elit tersebut. Sejarah kota dimulai saat statusnya ditetapkan sebagai milik seorang pejabat tinggi (Kuntowijoyo, 1994, hlm 51). Dengan demikian, lahirnya Depok sebagai kota ditandai pada tahun 1696, tanah Depok yang dikuasai oleh pejabat tinggi VOC bernama Cornelis Chastelein yang membeli tanah meliputi Depok, Mampang, Sringsing hingga Karang Anyar dari seseorang Residen Cirebon

bernama Lucas van der Meur seharga 300 *rijksadaalder* (Koin Belanda) (Wahyuning & Irsyam, 2017, hlm. 40). Status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda (Setiawati, 2015). Di awal abad ke-18 tepatnya pada tahun 1705, Cornelis membawa para budak-budaknya yang berjumlah 150 orang ke Depok dengan tujuan untuk menggarap tanahnya. Para budak yang dibawa berasal dari beragam pulau di Nusantara, yaitu Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa dan Timor-Timor (Wahyuningsih & Irsyam, 2017, hlm 41).

Cornelis pun dikenal sebagai orang Belanda yang sebenarnya anti perbudakan karena tidak sesuai dengan ajaran Injil. Cornelis sebagai penguasa tanah partikelir Depok, berniat untuk mendirikan masyarakatnya sendiri dengan tujuan utama yaitu mencapai kemandirian. Masyarakat Depok diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui hasil pertanian dan perkebunan. Untuk mencapai kemandirian, diperlukan sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola masyarakat Depok (Kwisthout, 2015, hlm. 63).

Sebelum wafat Cornelis mewariskan seluruh tanah pertanian dan perkebunan kepada para budaknya. Sebelum diwarisi tanah, sekitar 120 dari 150 orang budaknya dibaptis sebagaimana Cornelis beragama Kristen Protestan yang taat (Kwisthout, 2015, hlm.74). Pembaptisan dilakukan di Gereja Immanuel yang didirikan oleh Cornelis pada tahun 1700 (Purnomo, 1990, hlm 30). Setelah pembaptisan, Cornelis memberikan marga kepada budaknya sejumlah 12 marga. Marga-marga tersebut terdiri dari, (1) Jonathans, (2) Leander, (3) Laurens, (4) Joseph, (5) Loen, (6) Tholense, (7) Soedira, (8) Jacob, (9) Isakh, (10) Zadokh, (11) Bacas, (12) Samuel. Namun, keberadaan marga Zadokh sudah tidak ada lagi karena garis keturunan yang terputus, sehingga pada perkembangannya hanya 11 marga yang diakui secara resmi. (Jonathans, 2011, hlm. 40-42). Selain mendapatkan tanah, mereka juga mendapatkan 300 ekor sapi, seperangkat gamelan, dan senjata untuk membela diri. Setelah Cornelis wafat, warisan Cornelis diberikan kepada budaknya termasuk penghapusan status budak. Mereka inilah yang merupakan cikal bakal julukan “Belanda Depok” yang muncul karena gaya hidup mereka yang meniru gaya hidup orang Belanda, padahal mereka adalah orang pribumi. (Wanhar, 2011, hlm. 7).

Para budak tersebut membentuk pola masyarakat Kristen Depok yang kemudian menyatukan diri sebagai kaum Belanda Depok (Wanhar, 2011, hlm. 15). Hal ini menjadi bukti konkrit bahwa sebagai tuan tanah, Cornelis juga berperan besar dalam menyebarluaskan agama Kristen melalui para budaknya. Hal tersebut dapat diketahui dalam catatan surat wasiat yang ia tulis "*Mijn Intentie is dat te Depok mettertij een fraaie Christenbevolking groeie*". Artinya "Aku berharap agar Depok lambat laun bertumbuh menjadi masyarakat Kristen yang sejahtera" (Kwisthout, 2015, hlm. 100). Wasiat yang ditulis oleh Cornelis Chastelein menandai dimulainya era baru di Depok, wasiat tersebut pun menjadi kunci bagi sahnya kekuasaan kaum Belanda Depok meskipun berasal dari budak dapat memegang kendali atas tanah partikelir Depok di bawah kepemimpinan Jarong van Bali alias Batoepahan yaitu seorang asisten mandor kesayangan Cornelis (Chastelein, 1900). Kemudian kaum Belanda Depok membangun identitas serta menciptakan keturunannya yang menyatukan diri sebagai masyarakat Kristen Depok.

Secara historitasnya, era baru di Depok dimulai pada tahun 1871, diawali dengan pembentukan daerah otonom yang diusulkan oleh pemerintah Hindia Belanda. (Perwata, 2018, hlm. 437). Pada masa itu sangat diperlukan perubahan struktur pemerintahan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya urusan yang bersifat lokal dan mendesak yang tidak dapat ditanggung lagi oleh pemerintah pusat di Batavia. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pemerintah Belanda menerbitkan *Wet houdende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indië* pada tanggal 23 Juli 1903, atau lebih dikenal dengan nama *Decentralisatie Wet 1903*. Ini merupakan undang-undang otonomi pemerintah pertama yang dikeluarkan di Hindia Belanda. Kemudian undang-undang ini dipublikasikan melalui *Nederlandsche Staatsblad* No.329. Undang-undang ini mempengaruhi beberapa daerah di Hindia Belanda yang telah memenuhi syarat dalam perubahan status menjadi daerah otonom yang memiliki pemerintahan tersendiri, terpisah dari pemerintahan pusat namun tetap bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal (Hestiliani, 2019, hlm. 212-213).

Depok merupakan salah satu daerah otonomi dengan sebutan "*Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere*". Daerah otonom atau tanah partikelir ini merupakan hasil dari undang-undang desentralisasi. Depok memiliki pemerintahan terbatas

yang mengurus segala hal yang terkait dengan Tanah Depok dan masyarakatnya tanpa campur tangan luar. Dengan adanya konsep pemerintahan ini menjadi cikal bakal dari dipilihnya presiden Depok yang berasal dari kaum Belanda Depok. Pada tahun 1913, *Gemeente Bestuur* diresmikan dan Depok memiliki presiden pertama yaitu Gerrit Jonathans. Disebut presiden karena tugasnya untuk memimpin masyarakat Depok dan menyelesaikan tugas administrasi tanah partikelir Depok (Jonathans, 2011, hlm. 62-63).

Peraturan mengenai daerah otonom berlaku hingga tahun 1942 karena pada tahun tersebut, daerah otonomi Depok dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Sekitar Maret 1942, kekuasaan *Gemeente Bestuur* Depok mulai pudar. Pajak sudah tidak berlaku, seluruh hasil bumi Depok dirampas oleh Jepang (Muhsin, 2013, hlm. 25). Peraturan tersebut menyebabkan kemerosotan ekonomi masyarakat Depok dan perubahan struktur pemerintahan Depok di bawah kekuasaan *Bogor Ken* memperbolehkan *Gemeente Bestuur* berjalan dengan semula yang diorganisir oleh Presiden Depok (*Kan Po*, 1945, hlm. 12). Semua masyarakat Depok harus kembali menggarap pertanian dan perkebunan seperti biasa (Bey, 1987, hlm. 9)

Pada masa kemerdekaan, situasi politik di Depok mulai tak terkendali sejak Soekarno memproklamakan kemerdekaan Indonesia. Saat itu masyarakat Indonesia bergembira merayakan kemerdekaan Indonesia, hanya Depok yang tidak merayakan dan tidak ada satupun bendera merah putih berkibar di Depok. Hal inilah yang berdampak timbulnya konflik yang menjadi titik awal dari peristiwa “Gedoran Depok”. Nama “Gedoran” berasal dari pintu-pintu rumah kaum Belanda Depok digedor-gedor secara keras (Wanhar, 2011, hlm. 87).

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 8 April 1949, terbentuk kebijakan penghapusan tanah partikelir di seluruh Indonesia setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Hal ini bertujuan untuk mencabut hak otonomi dalam menjalankan pemerintahan di Depok (Wahyuningsih & Irsyam). Kemudian pada tahun 1952, dibentuk Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) secara resmi mengakui keberadaan 11 marga kaum Belanda Depok pasca kemerdekaan Indonesia (R. M. Jonathans, 2012, hlm 30).

Depok memiliki sejarah yang unik mengenai dinamika pemerintahannya. Berawal dari tanah dengan status *eigendom* dengan hak tanah partikelirnya lalu

berakhir menjadi tanah milik negara Republik Indonesia. Perubahan status tersebut dilandasi adanya keputusan penghapusan tanah partikelir di seluruh daerah Indonesia. Tak hanya itu, munculnya beberapa pergolakan di daerah-daerah Indonesia termasuk Depok saat masa revolusi kemerdekaan juga menjadi faktor terlaksananya kemerdekaan Indonesia yang tercapai berkat perjuangan bangsa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peranan Kaum Belanda Depok dalam Menjalankan Pemerintahan *Gemeente Bestuur* (1913-1952)”**.

Urgensi penelitian dengan memilih judul tersebut dikarenakan masih minimnya penelitian sejarah lokal yang mengulik tentang eksistensi kaum Belanda Depok dalam ranah politik dan sosial tahun 1913 hingga 1952. Penelitian ini berfokus untuk menjawab permasalahan mengenai peranan kaum Belanda Depok yang dilihat dari sudut pandang politik, yaitu dalam pemerintahan *Gemeente Bestuur* Depok yang berkuasa di tahun 1913-1952. Dalam periode tersebut, kaum Belanda Depok berkuasa atas tanah partikelir Depok karena adanya surat wasiat Cornelis Chastelein yang memberikan tanahnya untuk mantan budaknya yang kemudian menyatu menjadi kaum Belanda Depok. Penelitian ini juga menjawab tentang kehidupan kaum Belanda Depok pada akhir kekuasaan *Gemeente Bestuur* di tahun 1942-1952. Penelitian semacam ini menjadi penting mengingat kurangnya perhatian terhadap sejarah lokal, terutama melalui perspektif daerah yang merupakan kekayaan historis belum tergali sepenuhnya.

Judul ini dipilih penulis untuk memperkaya kajian mengenai sejarah lokal khususnya daerah Depok. Menurut penuturan J.J Rizal dalam wawancara dengan Narasi TV, sejarah mengenai kaum Belanda Depok menarik untuk dikaji karena masih banyak orang yang keliru mengenai julukan tersebut, mereka menduga kaum Belanda Depok adalah sekumpulan orang Belanda yang menetap di wilayah Depok. Bahkan ironisnya, masyarakat Depok saat ini pun tidak banyak yang mengetahui tentang eksistensi kaum Belanda Depok. Mereka tidak mengetahui bahwa Depok merupakan daerah yang telah merdeka lebih dahulu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Beberapa hal tersebut terjadi karena masyarakat Depok saat ini enggan mengingat sejarah kelam pada masa kolonialisme Belanda, mereka akan melupakan segala sesuatu yang berbau penjajahan yang mengacu pada penguasa Depok pada

masa lalu yaitu Cornelis Chastelein. Sentimen ini berlangsung hingga saat ini. Terbukti pada situs depok.go.id, sejarah Depok ditulis hanya dari tahun 1949, pemerintah kota Depok menganggap wajar jika situs sejarah dari masa sebelumnya tidak diurus, karena dianggap tidak penting dan bukan bagian dari sejarah Depok. Padahal jika dipelajari lebih lanjut, sejarah Depok merupakan sejarah lokal yang unik dan sangat menarik untuk dikaji dan dibanggakan. Unik karena pada masa itu daerah Depok sudah termasuk daerah yang berkecukupan secara ekonomi dibandingkan daerah sekitarnya. Hal ini berkaitan karena Cornelis Chastelein sangat peduli kepada masyarakatnya. Selain itu, penulis merasa terdorong secara emosional untuk menyelidiki lebih dalam, mengingat Depok adalah tempat kelahiran penulis.

Penelitian mengenai topik Belanda Depok telah beberapa kali dilakukan. Tahun (2008) dan (2017), Trianasari dan Aditiya membahas Peristiwa Gedoran di Depok pada masa Revolusi Sosial, pada kedua skripsi ini dijelaskan secara rinci mengenai latar belakang hingga dampak yang ditimbulkan dari Peristiwa Gedoran Depok. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anugerahningtyas (2021) membahas pembentukan dan penghapusan identitas Belanda Depok, pada penelitian ini berfokus pada pembentukan identitas Belanda Depok berdasarkan historisnya. Riset terakhir yang ditemukan ditulis oleh Pingkan (2022) berkenaan dengan Belanda Depok sebagai komunitas Kristen Depok yang berbudaya Indis, penelitian ini menyoroti mengenai perkembangan budaya Indis yang kemudian tersalur kepada kaum Belanda Depok.

Penelitian ini tentunya akan berbeda dan melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian mengenai Depok telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks sosial budaya. Dalam penelitian ini penulis akan lebih menyoroti mengenai kaum Belanda Depok yang sangat berpengaruh bagi dinamika pemerintahan Depok. Tentunya, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kebaruan dengan memperluas cakupan dan mendalami aspek politik yang belum terungkap pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian sejarah yaitu berdasarkan batasan spasial (ruang) dan temporal (waktu). Batasan spasial yaitu pada daerah Depok, Jawa Barat yang menjadi tempat tinggal kaum Belanda Depok. Kemudian batasan temporal yaitu tahun 1913, menjadi awal

periode bagi penulis karena berkaitan dengan peresmian *Gemeente Bestuur* Depok. Tahun 1952 dipilih menjadi batasan akhir periode dalam penelitian ini karena terbentuknya YLCC (Yayasan Cornelis Chastelein). YLCC menjadi sebuah lembaga yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya dan identitas Belanda di Depok setelah perubahan politik yang mengakhiri kepemilikan tanah partikelir di seluruh Indonesia, YLCC bahkan masih berlangsung hingga kini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang di atas, yang menjadi pokok penelitian dari topik yang dikaji adalah “Bagaimana peranan kaum Belanda Depok dalam menjalankan pemerintahan *Gemeente Bestuur* (1913-1952) ?”. Agar memperoleh hasil penelitian yang baik dan mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah supaya penelitian tidak terlalu luas sehingga hasil yang diperoleh lebih terarah, penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi kaum Belanda Depok dalam membentuk pemerintahan *Gemeente Bestuur*?
2. Bagaimana kiprah politik kaum Belanda Depok dalam menjalankan pemerintahan *Gemeente Bestuur* (1913-1942)?
3. Bagaimana kondisi kaum Belanda Depok di akhir masa pemerintahan *Gemeente Bestuur* (1942-1952)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai “Peranan Belanda Depok dalam *Gemeente Bestuur* (1913-1952)”. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Mendeskripsikan latar belakang kaum Belanda Depok dalam membentuk pemerintahan *Gemeente Bestuur*, terdapat Cornelis Chastelein sebagai pendiri Depok dan terbentuknya kaum Belanda Depok.

2. Menganalisis kiprah politik kaum Belanda Depok dalam menjalankan pemerintahan *Gemeente Bestuur*; terdapat peresmian *Gemeente Bestuur* Depok dan penetapan Presiden Depok.
3. Menjelaskan kondisi akhir kaum Belanda Depok di akhir masa pemerintahan *Gemeente Bestuur*; terdapat kolonialisme Jepang di tahun 1942-1945, terjadinya peristiwa Gedoran Depok pada awal kemerdekaan Indonesia, penghapusan tanah partikelir Depok pada tahun 1949 dan pembentukan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) di tahun 1952.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait “Peranan Belanda Depok dalam kekuasaan *Gemeente Bestuur* (1913-1952)”. Khususnya bagi Program Studi Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

Adapun penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis di antaranya :

1. Memperkaya khasanah pustaka penulisan sejarah lokal di Depok dan bagian dari konstruksi pembentukan identitas bangsa Indonesia di masa lalu.
2. Menambah pengetahuan dan meluruskan pemahaman tentang latar belakang julukan “Belanda Depok”.
3. Menjadi sumber referensi tambahan untuk bahan ajar bagi peserta didik SMA/MA/Sederajat. Khususnya bagi mata pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI, terkait materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Secara praktik, skripsi ini sejalan dengan materi Kompetensi Dasar (KD) 3.3 terkait “Menganalisis dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, dan Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini”.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan Sistematika Penulisan Karya Ilmiah UPI tahun 2021. Adapun struktur organisasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, penulis memaparkan pokok pikiran mengenai segala hal yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini seperti: Latar belakang penelitian, bagian ini penulis akan memberikan alasan mengapa melakukan penelitian ini; Rumusan masalah, bagian ini memuat identifikasi permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian; Tujuan penelitian, tujuan penelitian pada dasarnya merupakan cerminan dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti; Manfaat penelitian, bagian ini menggambarkan nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti; dan Struktur organisasi skripsi, bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi dengan memberikan gambaran isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka, akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep atau teori yang menjadi acuan dalam keterkaitannya dengan konten penelitian. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu berupa skripsi, buku dan jurnal yang relevan dengan topik yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini serta sebagai upaya untuk terhindar dari plagiarisme penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, akan dibahas mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode historis. Selain itu, proses penelitian sendiri disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI dan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Bab IV Pembahasan, penulis akan memaparkan fokus utama dari penelitian. Pada BAB ini, terdapat hasil temuan berupa fakta-fakta sejarah yang berasal dari data yang sudah di proses secara kritis pada metode penelitian. Data tersebut kemudian diolah menjadi pembahasan sehingga mampu menjawab rumusan masalah serta tercapainya tujuan yang telah dirumuskan pada BAB pendahuluan.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang disajikan dalam penelitian. Penulis akan menyimpulkan dari berbagai temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian khususnya bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.